



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Peran Strategis APIP dalam rangka Meningkatkan Kualitas Dokumen Anggaran K/L melalui Reviu RKA-K/L

HERU SUSANTO

Auditor Madya Inspektorat Jenderal

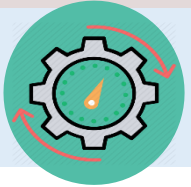
Jakarta, 14 Juli 2020



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

Outline



Dokumen Pendukung RKA-K/L



Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Auditor



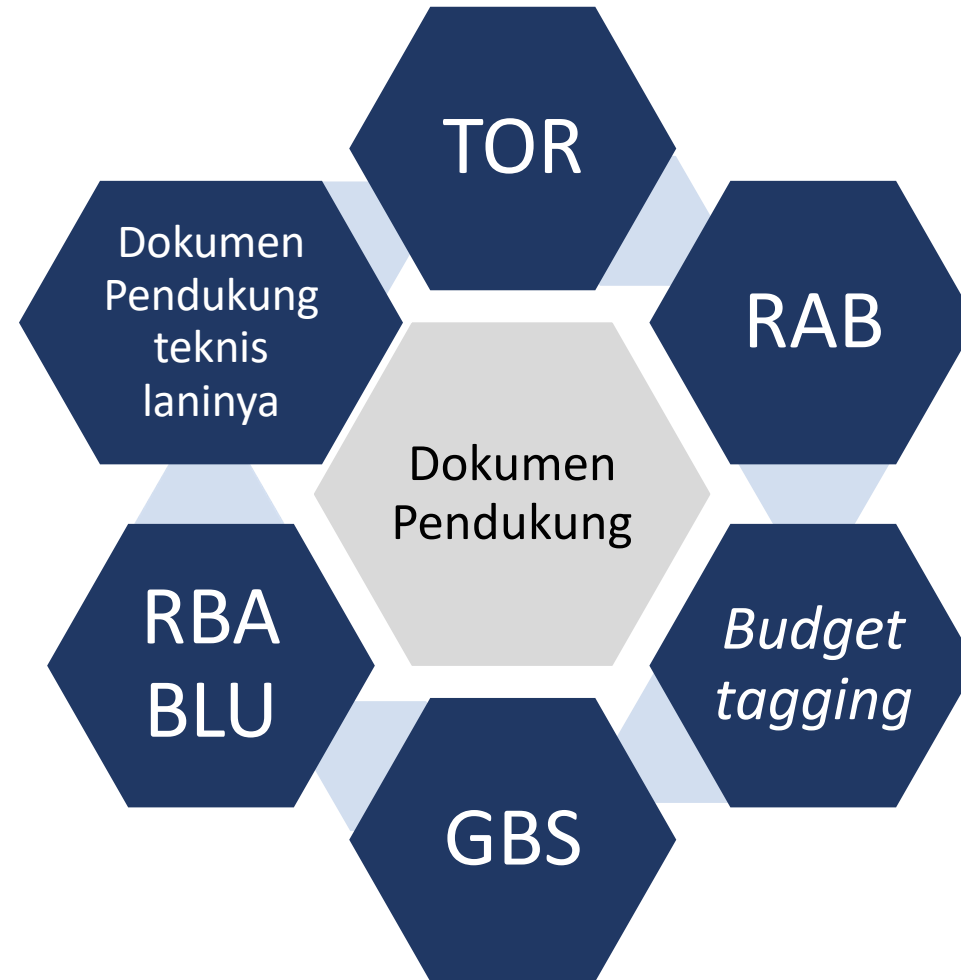
Persiapan Tim Reviu Perencanaan Penganggaran dan BMN

Dokumen Pendukung RKA-K/L



Unit Eselon I penyusun menyampaikan RKA-K/L (ADK dan dokumen pendukung) kepada APIP dan Biro Perencanaan K/L secara elektronik (*softcopy*). Dokumen harus diterima sebelum ADK disampaikan ke DJA

Di era New Normal, pembahasan bersama Reviu oleh APIP dan penelitian oleh Biro Perencanaan dan Unit Eselon I penyusun dilakukan tanpa melalui tatap muka (melalui aplikasi video conference)



Dokumen Pendukung RKA-K/L



Term of Reference (TOR)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20XX

Kementerian Negara/Lembaga	:	(1)
Unit Eselon I/II	:	(2)
Program	:	(3)
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	(4)
Kegiatan	:	(5)
Indikator Kinerja Kegiatan	:	(6)
Jenis Keluaran (<i>Output</i>)	:	(7)
Volume Keluaran (<i>Output</i>)	:	(8)
Satuan Ukur Keluaran (<i>Output</i>)	:	(9)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum (10)
2. Gambaran Umum (11)

B. Penerima Manfaat (12)

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan (13)
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14)

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran (15)

E. Biaya Yang Diperlukan (16)

Kegiatan	Penanggung jawab	Unit
.....
NIP.....

Rincian Anggaran Belanja (RAB)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA KELUARAN DOKUMEN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN SENGKETA SERTA PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL TA 2020								
Kementerian Negara/Lembaga			: Kementerian Keuangan					
Unit Eselon II/Setker			: Direktorat Perpajakan Internasional					
Kegiatan			: Perumusan Kebijakan dan Standardisasi Perpajakan Internasional					
Keluaran (Output)			: Dokumen Pencegahan dan Penanganan Sengketa serta Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional					
Volume			: 5					
Satuan Ukur			: Dokumen					
Alokasi Dana			: Rp3.698.109.009,-					
Kode	Uraian Suboutput/Komponen/Subkomponen/Detail	Volume Suboutput	Jenis Komponen (Utama/Pendukung)	Rincian Perhitungan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
015.04.12	Program Peningkatan dan Penguatan Penertiban Pajak							3.698.109.009
5600	Perumusan Kebijakan dan Standardisasi Perpajakan Internasional							3.698.109.009
8880.502	Dokumen Pencegahan dan Penanganan Sengketa serta Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional	5	Dokumen					3.698.109.009
8880.502.001	Dokumen Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional	5	Dokumen					2.368.334.000
051	Persiapan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional							1.195.800.000
A	Persiapan Perumusan terkait Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional (MAP/APA)							1.195.800.000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya							1.155.000.000
	- Langganan Database komersial				1	PKT	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Pembelian Souvenir Untuk keperluan Pertemuan Internasional				50	PKT	700,000	35.000,000
	- Tas Penyimpanan Dokumen Sengketa Perpajakan Internasional				30	UNIT	2.000,000	60.000,000
	- Perlengkapan Penunjang Pertemuan Resmi Internasional				50	UNIT	2.000,000	60.000,000
524111	Belanja perjalanan biasa							28.000,000
	- Perjalanan Dinas Dalam Negeri				7	OK	4.000,000	28.000,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							10.800,000
	- Transportasi Dalam Kota (2 ST x 3 Orang x 12 Bulan)				72	OK	150,000	10.800,000
052	Pelaksanaan Peraturan terkait Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional							1.056.344.000

Dokumen Pendukung RKA-K/L



Gender Budget Statement (GBS)

GENDER BUDGET STATEMENT TAHUN ANGGARAN 20xx

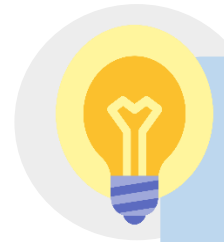
Nama K/L :
 Unit Organisasi :
 Unit Eselon II/Satker :

Program
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 2. 3.
Output Kegiatan
Tujuan Aktivitas

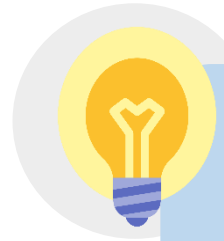
Analisis Situasi	URAIAN RINGKAS	
Rencana Aksi	Output
	Aktivitas	1. 2. 3.
Alokasi Anggaran Aktivitas Kegiatan	Rp	
Dampak/Hasil Aktivitas Kegiatan	

Penanggung Jawab Kegiatan

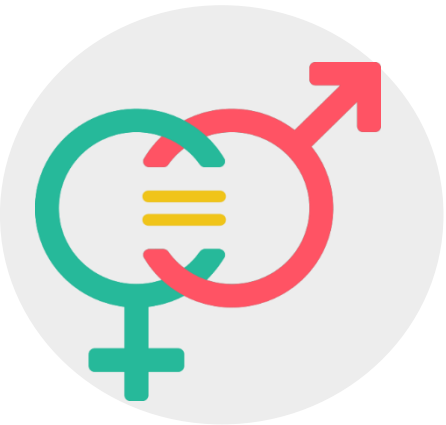
.....
 NIP



GBS adalah dokumen yang menyatakan adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan.



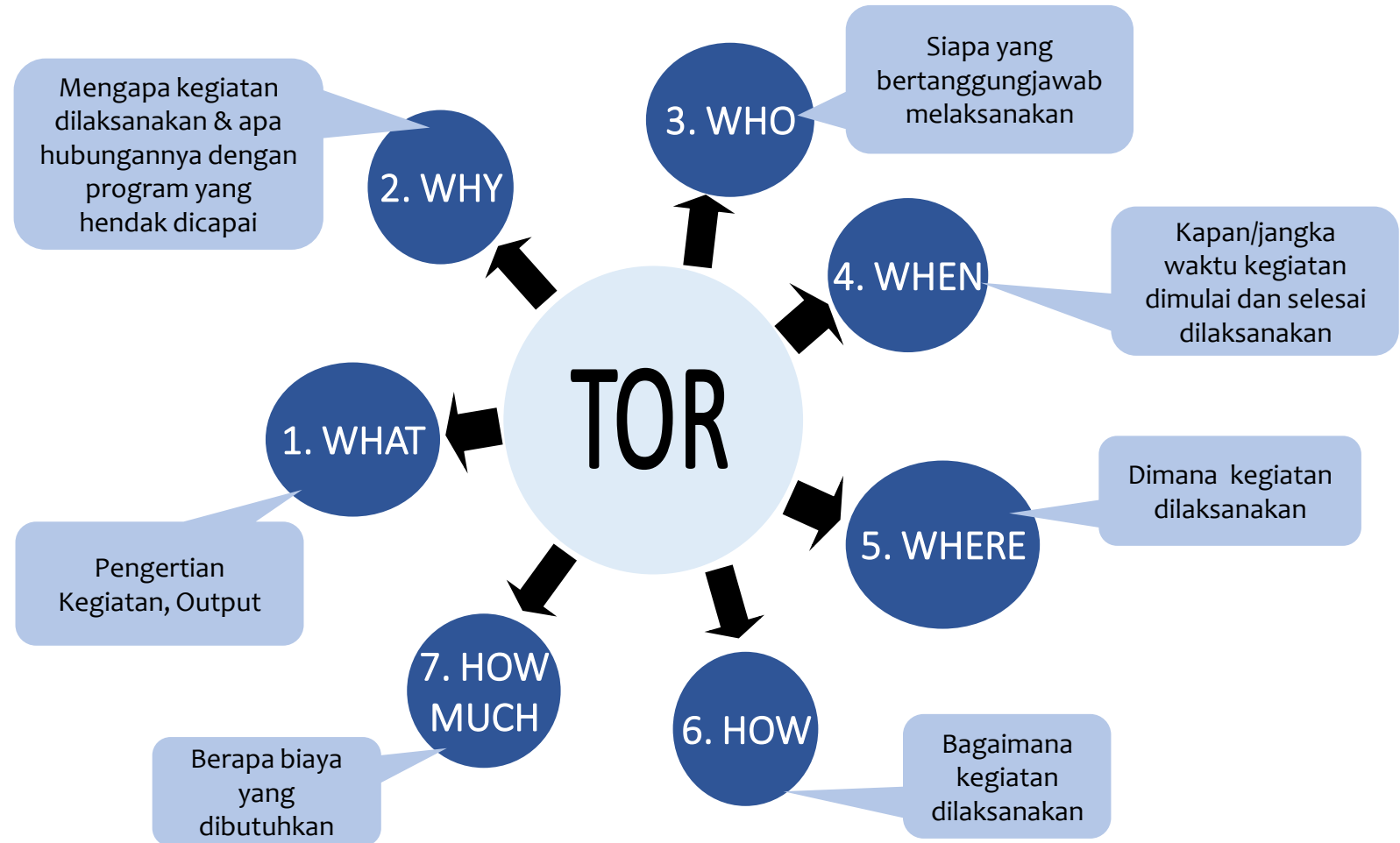
GBS bermakna bahwa rencana, program, dan kegiatan telah disusun melalui analisis gender sesuai instrumen Gender Analysis Pathway (GAP).



Reviu atas *Terms of Reference*



Pereviu harus melakukan penelaahan aspek substansi dan formal atas TOR dan dokumen pendukung lainnya



Format Penyusunan Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan dalam TOR

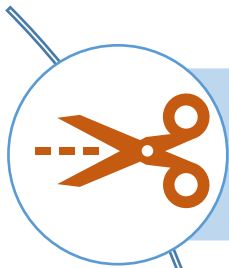


Belanja Modal Kontraktual - Konstruksi

Tahapan Kegiatan	20x1		20x2											
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Konsultan Pengawas/Manajemen Konstruksi														
-RUP	MK													
-Pemilihan Penyedia B/J				Pengawas										
-Penandatanganan kontrak			MK			Pengawas								
-Pelaksanaan			MK	MK	MK	MK	MK	MK	MK	MK	MK	MK	MK	MK
-Serah terima pekerjaan												Pengawas		MK
Konsultan Perencana														
-RUP	MK													
-Pemilihan Penyedia B/J				MK										
-Penandatanganan kontrak			Pengawas		MK									
-Pelaksanaan				Pengawas	MK	MK	MK							
-Serah terima pekerjaan					Pengawas		MK							
Konstruksi Fisik														
-RUP	MK													
-Pemilihan Penyedia B/J						Pengawas		MK						
-Penandatanganan kontrak						Pengawas		MK						
-Pelaksanaan							Pengawas	MK	MK	MK	MK	MK	MK	MK
-Serah terima pekerjaan												Pengawas		MK
Pengelola Kegiatan														

MK
 Pengawas

Apa yang Perlu Diperhatikan oleh Auditor ?



Efisiensi Anggaran Birokrasi



Ketentuan “Hal-Hal yang Dibatasi untuk Dialokasikan”



Dinamika Perubahan yang Berdampak pada Anggaran



Kewajaran Anggaran

Reviu - Efisiensi Belanja Birokrasi



Apa yang Perlu Diketahui oleh Pereviu?



APIP memberikan rekomendasi saat Biro Perencanaan akan menyusun kebijakan langkah-langkah penyusunan RKA-K/L.

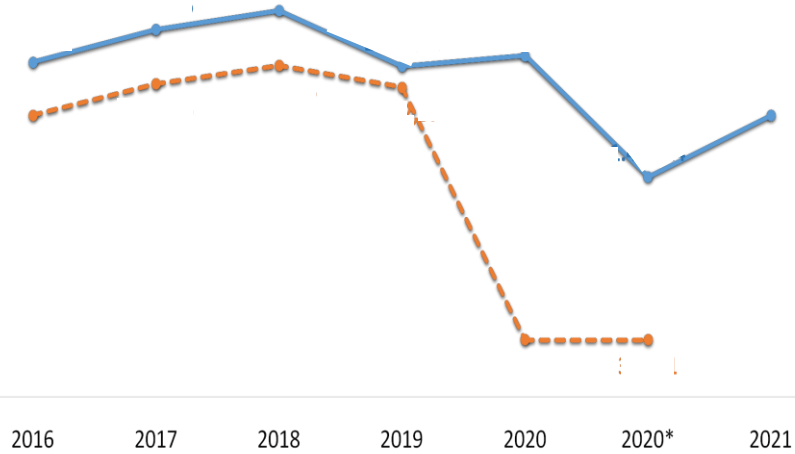


APIP melakukan *monev* berkelanjutan atas pelaksanaan anggaran agar dapat mengupayakan langkah-langkah perbaikan efisiensi anggaran.

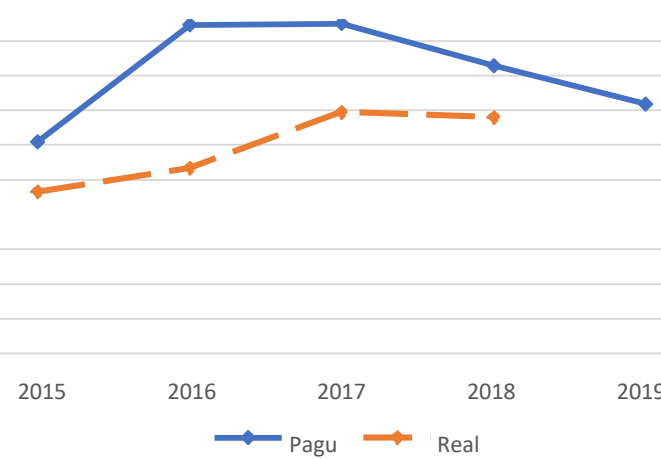


Reviu - Efisiensi Belanja Birokrasi

Belanja Birokrasi



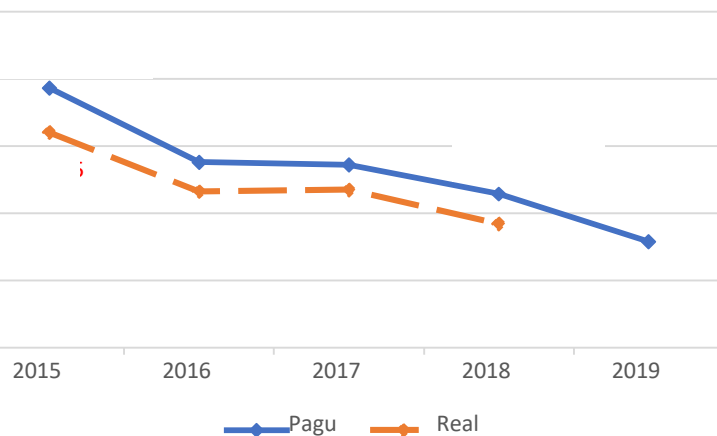
Perjadin Luar Negeri



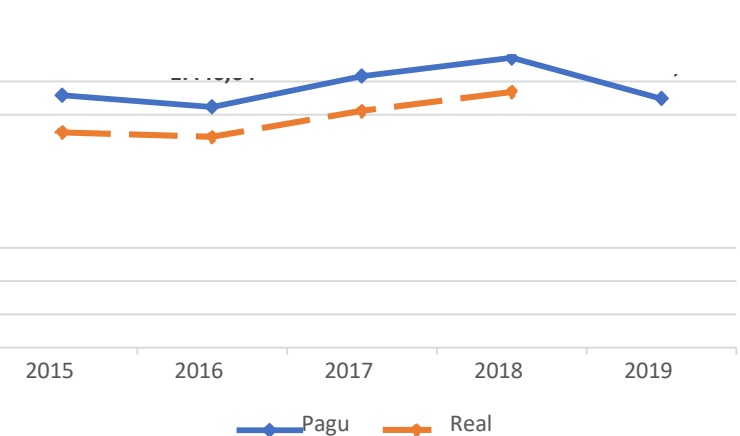
Kenaikan Belanja bahan ATK dan Perjadin dalam negeri tahun 2017 dan 2018 disebabkan kegiatan AM IMF-WB



Honorarium



Perjadin Dalam Negeri



Reviu – Hal-Hal yang Dibatasi untuk Dialokasikan



Apa yang Perlu Diketahui oleh Pereviu?



Pembangunan Gedung Baru

Pembangunan gedung baru untuk kantor pelayanan (memperhatikan moratorium pembangunan Gedung)



Pembatasan Pengadaan Kendaraan Bermotor

- Kendaraan bermotor roda 2 lebih diprioritaskan untuk satker pelayanan dan memperhatikan wilayah kerja
- Kebijakan data dukung menggunakan *pricelist* (tidak menggunakan SBM)



Pembatasan Pemberian Honorarium Tim dan Belanja Honorarium Jasa Profesi

Dialokasikan secara *Negative Growth* dari tahun ke tahun

Reviu – Dinamika Perubahan yang Berdampak pada Anggaran

PERUBAHAN

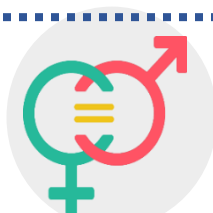
Perubahan Organisasi
(Delayering)

Perubahan Budaya Kerja



Kebijakan *Flexible Working Space* dan *Work From Home*

Pengarustamaan Gender



Kebijakan ARG

Dinamika Lingkungan dan
Kondisi Geografis



Perubahan zona gempa

DAMPAK

Konsep *Open Space* (tidak menggunakan *cubicle*)

Penurunan kebutuhan luasan Gedung kantor

Penurunan kebutuhan *filling cabinet/mobile file*, kendaraan operasional kantor

Peningkatan kebutuhan *IT End User, video conference, server*

Perencanaan sarana prasarana sesuai kebutuhan gender (tempat penitipan anak, ruang laktasi)

Peningkatan kebutuhan Asuransi BMN

Pembangunan Gedung bertingkat dengan struktur konstruksi tahan gempa

Pembangunan Gedung memperhatikan konsep *green building*

Reviu – Kewajaran Anggaran



Peralatan yang tidak mendukung tugas fungsi, misalnya setrika, *coffee maker*, aquarium di ruang kerja



Printer/scanner untuk masing-masing pegawai vs mesin fotocopy multifungsi (sewa dengan MYC)

Konsultan pengawas untuk penataan ruangan



Harga satuan renovasi Gedung kantor (bertingkat) lebih tinggi dari renovasi rumah dinas dengan tingkat kerusakan yang sama dan lokasi yang sama

Persiapan Tim Reviu Perencanaan Penganggaran dan BMN





Terima Kasih


Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Gedung Djuanda II Lantai 4-13
Jl DR Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
Telp. (021) 3865430

 www.itjen.kemenkeu.go.id

 ItjenKemenkeu

 ItjenKemenkeu

 itjenkemenkeu

